

---

---

## ANGGARAN BERBASIS PRO GENDER BUDGETING DITINJAU DARI KEPEMIMPINAN DAN LEGISLATIF PEREMPUAN

Suci Nurul Khotimah<sup>1</sup>, R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email Korespondensi: raden.ak@upnjatim.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran perempuan dalam kepemimpinan dan keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam mendorong anggaran berbasis gender di tingkat pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah melakukan penelitian literatur dengan meninjau berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, partisipasi politik, dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan gender. Metode analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis, perempuan yang memegang posisi pemimpin dan perwakilan di lembaga legislatif memiliki kemampuan untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap gender. Namun, faktor institusional, budaya politik, kapasitas fiskal, dan komitmen pemerintah daerah memengaruhi seberapa kecil pengaruh tersebut dalam praktiknya.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan Perempuan, Partisipasi Anggota Legislatif, Anggaran Berbasis Pro Gender Budgeting

### ABSTRACT

*This study aims to examine the role of women in leadership and the involvement of female legislators in promoting gender-responsive budgeting at the local government level. The method employed is a literature study by reviewing various sources, including books, journal articles, and research reports related to women's leadership, political participation, and gender-responsive budgeting. A descriptive qualitative analysis method is used to identify, compare, and synthesize findings from previous studies. The results indicate that, theoretically, women in leadership positions and legislative representation have the potential to promote more gender-responsive policies. However, in practice, the extent of this influence remains limited due to institutional factors, political culture, fiscal capacity, and the level of commitment of local governments.*

**Keywords:** Women's Leadership, Legislative Participation, Gender-Responsive Budgeting

## PENDAHULUAN

Ketimpangan gender di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebesar 0,459. Angka ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan masih berbeda dalam hal kesehatan reproduksi, pemberdayaan dalam hal pendidikan dan keterwakilan politik, dan partisipasi ekonomi. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun ada perbaikan dibandingkan sebelumnya. Selain itu, kondisi ini terlihat dalam keterwakilan perempuan di pemerintahan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, persentase perempuan di lembaga legislatif masih berkisar antara 21 dan 22%, dan jumlah perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah juga cukup rendah. Keterwakilan yang kurang dapat berdampak pada proses pengambilan kebijakan, termasuk membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender. Menurut Keelson et al., (2025) perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan cenderung memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi terhadap kebutuhan sosial dan kepentingan kelompok yang kurang terwakili. Sementara menurut Sobeukum (2024) keterlibatan aktif anggota legislatif, khususnya perempuan, menjadi faktor penting dalam memasukan perspektif gender dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana peran perempuan dalam struktur pemerintahan dapat memengaruhi kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap gender.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, masih ada beberapa masalah yang menghalangi penerapan anggaran berbasis gender di tingkat daerah. Karena dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKPD dan APBD seringkali hanya bersifat administratif dan belum menyentuh aspek penting, perspektif gender belum sepenuhnya diintegrasikan. Ini merupakan masalah besar. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kekurangan sumber daya manusia, kurangnya data terpilah gender, dan kurangnya komitmen institusional. Kondisi ini menyebabkan program dan kegiatan yang dibuat tidak dapat secara adil memenuhi kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan.

Sebaliknya, penganggaran daerah adalah proses politik yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Dalam keadaan seperti ini, peran perempuan dalam struktur pemerintahan sangat penting untuk menjamin bahwa perspektif gender tidak terabaikan. Namun demikian, kekurangan perempuan seringkali menyebabkan suara dan kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam diskusi kebijakan. Akibatnya, kebijakan keuangan yang dibuat mungkin tidak sepenuhnya mematuhi keadilan dan kesetaraan gender.

Penelitian ini didorong oleh pentingnya memahami secara lebih komprehensif hubungan antara keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan dengan kebijakan anggaran yang dihasilkan. Peningkatan jumlah perempuan dalam posisi strategis diharapkan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan perempuan dan partisipasi anggota legislatif perempuan dalam mendorong anggaran responsif gender di tingkat pemerintah. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sejauh mana kepemimpinan dan keterwakilan perempuan berpengaruh terhadap kebijakan penganggaran yang responsif terhadap gender.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai

hubungan antara kepemimpinan perempuan, representasi politik, dan kebijakan anggaran berbasis gender. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat peran perempuan serta meningkatkan efektivitas implementasi anggaran responsif gender guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis dan partisipasi anggota legislatif perempuan dalam mendorong anggaran berbasis pro gender budgeting. Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah berupa jurnal yang diterbitkan pada periode 2021–2026, dengan kata kunci seperti Women Leadership, keterwakilan legislatif, dan anggaran berbasis pro gender budgeting. Sumber data diperoleh dari melalui database Taylor & Francis Journal. Artikel yang dipilih merupakan artikel dari jurnal terindeks Scopus dengan peringkat minimal Q2 berdasarkan SJR, berstatus open access atau open archive. Kriteria pemilihan sampel untuk literature review sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Sampel

Tahap	Langkah Penyaringan	Artikel dalam Sampel	Kriteria Eksklusi dan Inklusi	Artikel yang dikeluarkan
Identifikasi	Artikel yang diidentifikasi dari basis data Scopus (n = 1005)	1005	Pengecualian artikel duplikat	0
	Penyaringan berdasarkan akses artikel	1005	Artikel yang tidak termasuk kategori open access dan open archive dikeluarkan dari sampel penelitian	679
Penyaringan	Penyaringan berdasarkan tahun publikasi	120	Artikel yang diterbitkan di luar rentang lima tahun terakhir (2021–2026) dikeluarkan dari sampel penelitian.	35
	Artikel dinilai kembali berdasarkan jenis publikasi dan bidang topik jurnal	95	Artikel dari publikasi selain bidang bisnis, manajemen, akuntansi, atau keuangan dikeluarkan	20
	Artikel disaring menggunakan kata kunci, judul, abstrak, dan pencarian kata kunci	50	Artikel di luar ruang lingkup tinjauan dikeluarkan setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap judul, abstrak, kata kunci, metodologi penelitian, model penelitian, dan deskripsi variabel	15

Tahap	Langkah Penyaringan	Artikel dalam Sampel	Kriteria Eksklusi dan Inklusi	Artikel yang dikeluarkan
	Membaca artikel secara lengkap untuk menentukan inklusi akhir	10	Pembacaan teks lengkap digunakan untuk menyaring publikasi yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian tinjauan	5
Inklusi		5		

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti berhasil mengidentifikasi 6 jurnal relevan yang membahas peran kepemimpinan perempuan dan partisipasi anggota legislatif perempuan terhadap proporsi anggaran berbasis *pro gender budgeting*. Hasil kajian tersebut dirangkum pada tabel 2.

Tabel 2. Artikel Relevan dengan Topik Penelitian

Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Populasi/Sampel	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Hoyong Jung, (2021)	<i>The Effect of Mayoral Gender on Gendered Budget: Evidence from South Korea</i>	Kuantitatif dengan OLS, <i>Fixed Effect Model</i> dan <i>Regression Discontinuity Design</i>	229 Pemerintah daerah di Korea Selatan tahun 2016 – 2020	Menganalisis apakah perbedaan jenis kelamin wali kota berpengaruh terhadap alokasi anggaran yang responsif gender di kota-kota di Korea Selatan selama periode 2016–2020	-Walikota perempuan tidak meningkatkan rasio anggaran gender. -Anggaran lebih dipengaruhi oleh faktor afiliasi partai, kemandirian fiskal dan jumlah penduduk.
Sun-Moon Jung, (2022)	<i>Determinants of Gender Budgeting Practices: Evidence from Municipal Governments in South Korea</i>	Kuantitatif dengan OLS, <i>Fixed Effect Model</i> dan <i>Regression Discontinuity Design</i>	66 pemerintah kota di Korea Selatan 2013-2028	Mengidentifikasi berbagai faktor penentu yang memengaruhi praktik anggaran responsif gender di tingkat pemerintah daerah di Korea Selatan.	-Tidak ditemukan bukti kuat bahwa jenis kelamin walikota (perempuan) secara otomatis meningkatkan alokasi anggaran gender dalam sampel ini

Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Populasi/Sampel	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Maria Teresa, 2021	<i>The impact of women's leadership in local governments: the case of Spain</i>	Kuantitatif dengan OLS, <i>Fixed Effect Model</i> dan <i>Regression Discontinuity Design</i>	2,700 pemerintah di Spanyol	Menganalisis apakah kepemimpinan Perempuan berpengaruh terhadap anggaran daerah.	-Kepemimpinan perempuan merupakan salah satu faktor meningkatnya anggaran berbasis gender
Moser & Korac (2021)	<i>Introducing Gender Perspectives in the Budgetary Process at the Central Government Level</i>	Deskripsi Kualitatif		Mengkaji bagaimana pengenalan perspektif gender dalam dokumen anggaran telah memengaruhi alokasi sumber daya publik di tingkat pemerintah pusat di Austria.	90% pidato yang menyebutkan informasi terkait penganggaran berbasis gender disampaikan oleh politisi perempuan dan terdapat 18 pembicara yang merujuk pada penganggaran berbasis gender.
Mueller & Salitere (2024)	<i>Assessing the Role of Gender – Related Aspects in Public Budgeting Debates: A view of the Central Level in Germany</i>	Deskripsi Kualitatif		Mengetahui bagaimana anggota legislatif membahas aspek – aspek terkait gender dalam proses penganggaran di tingkat pusat di Jerman.	Anggota perempuan lebih sering mengangkat isu gender dibandingkan laki – laki dengan 325 berbanding 188 penyebutan. Anggota perempuan juga jauh lebih cenderung merujuk pada sumber daya atau anggaran daripada anggota laki – laki.

### Pengaruh Kepemimpinan Perempuan Terhadap Anggaran Berbasis Pro Gender Budgeting

Berdasarkan tabel 2, maka dapat dijelaskan bahwa, kepemimpinan perempuan secara teoritis berperan besar dalam mendorong penganggaran berbasis gender. Ini berdasarkan pada gagasan bahwa perempuan lebih sensitif terhadap masalah sosial,

terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kebutuhan kelompok rentan (Keelson et al., 2025).

Berdasarkan teori keagenan, pemimpin daerah sebagai agen dapat merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok tertentu melalui pengalokasian anggaran berbasis gender. Selain itu, keberadaan pemimpin perempuan dianggap memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap isu kesetaraan gender, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan proporsi anggaran yang responsif gender. Namun, berdasarkan artikel yang telah dikaji pada tabel 1.1, membuktikan bahwa walikota perempuan memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap anggaran berbasis pro gender budgeting. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses penyusunan serta pengambilan keputusan anggaran di tingkat daerah. Selain itu, dinamika politik dan kondisi kelembagaan di setiap daerah turut memengaruhi penentuan prioritas kebijakan, sehingga faktor gender dalam kepemimpinan menjadi kurang dominan dalam memengaruhi alokasi anggaran (H. Jung, 2021).

Berbagai faktor lain yang lebih penting dalam proses pengambilan keputusan anggaran, seperti kapasitas fiskal daerah, afiliasi politik, kondisi demografis, budaya, dan sistem kelembagaan, memengaruhi arah kebijakan anggaran. Perbedaan hasil ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Selain itu, tingkat komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan pengarusutamaan gender juga merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penerapan anggaran berbasis gender. Dengan demikian, pemimpin gender bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi pengembangan kebijakan anggaran yang responsif gender.

Selain faktor-faktor tersebut, penting untuk diingat bahwa proses penganggaran daerah melibatkan banyak pihak, baik legislatif maupun eksekutif. Ini berarti bahwa sebagai kepala daerah, dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas pengalokasian anggaran. Meskipun kebijakan yang lebih responsif terhadap gender disukai oleh pemimpin perempuan, mereka harus tetap diterapkan melalui negosiasi politik, anggaran bersama DPRD, dan penyesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam situasi ini, pengaruh individu yang memegang posisi pemimpin, termasuk faktor gender, sangat terbatas dalam menentukan hasil akhir kebijakan anggaran.

### **Pengaruh Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Terhadap Anggaran Berbasis Pro Gender Budgeting**

Hasil peninjauan literatur menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan sangat berperan dalam mendorong peningkatan anggaran berbasis gender. Secara umum, perempuan yang bekerja di lembaga legislatif biasanya lebih aktif berbicara tentang kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan kebutuhan kelompok rentan. Hal ini membuat mereka lebih bersemangat untuk mendukung kebijakan dan alokasi anggaran yang responsif gender selama proses persetujuan anggaran.

Hasil penelitian yang dikaji memperkuat hal tersebut. Penelitian oleh Moser & Korac (2021) menunjukkan bahwa politisi perempuan lebih mengangkat isu tentang gender dalam proses anggaran. Selain itu, penelitian oleh Mueller & Saliterer (2024) menemukan bahwa anggota legislatif perempuan lebih sering berbicara tentang masalah gender dibandingkan dengan anggota legislatif laki-laki, dan mereka juga lebih sering berbicara tentang masalah anggaran atau sumber daya dalam diskusi kebijakan. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hubungan langsung dengan masalah gender

dan alokasi dana.

Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa perempuan lebih sensitif terhadap kebijakan yang berdampak pada kelompok tertentu karena pengalaman dan pandangan mereka yang berbeda tentang bagaimana melihat ketimpangan sosial. Mereka berfungsi sebagai representasi substantif di parlemen karena mereka tidak hanya hadir secara numerik tetapi juga aktif memperjuangkan kepentingan perempuan melalui kebijakan publik, seperti penganggaran. Oleh karena itu, semakin banyak anggota legislatif perempuan, semakin besar peluang untuk memasukkan perspektif gender dalam anggaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi legislatif perempuan meningkatkan anggaran berbasis gender. Dengan mendorong diskusi gender yang lebih inklusif, mereka memainkan peran penting dalam proses legislasi dan penganggaran. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat implementasi gender budgeting di tingkat pemerintahan.

## KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kepemimpinan perempuan dan keterlibatan anggota legislatif perempuan berdampak pada anggaran yang disusun dengan cara yang pro gender. Kajian literatur menunjukkan bahwa secara konseptual, kepemimpinan perempuan dapat mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap gender. Namun, secara empiris, dampak ini belum menunjukkan hasil yang konsisten dan mungkin tidak signifikan karena berbagai faktor, termasuk afiliasi politik, kekuatan fiskal daerah, dan keadaan kelembagaan, berperan. Sebaliknya, terbukti bahwa anggota legislatif perempuan memiliki pengaruh yang lebih besar; mereka lebih sering menyuarakan masalah gender dan mendukung pembagian anggaran yang lebih baik untuk kelompok rentan.

Penelitian ini menegaskan bahwa representasi perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif sangat penting untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif. Dari perspektif praktis, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan anggaran responsif gender. Selain itu, diperlukan komitmen kelembagaan dan dukungan kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa pengarusutamaan gender terintegrasi secara efektif dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Dengan menggunakan metode *literature review*, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada temuan penelitian sebelumnya tanpa melakukan pengujian langsung dengan data empiris. Selain itu, sumber literatur yang digunakan masih terbatas pada periode waktu dan database tertentu, sehingga mereka belum sepenuhnya mencerminkan keadaan yang lebih luas. Hasil yang berbeda dari berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa hasil yang dihasilkan dipengaruhi oleh konteks pemerintahan dan wilayah.

Oleh karena itu, disarankan bahwa penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data empiris, seperti data panel, agar dapat menguji hubungan antar variabel dengan lebih akurat. Penelitian lanjutan juga dapat menambahkan variabel tambahan, seperti komitmen pemerintah daerah, kapasitas fiskal, dan budaya politik, untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh. Untuk membuat hasil penelitian lebih relevan untuk mendukung kebijakan pengarusutamaan gender, objek penelitian harus

diperluas, terutama pada tingkat daerah di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, I. (2024). *Legitimacy of government and governance*. 1–23. <https://doi.org/10.1017/S1744137423000334>
- Ayu, V. D. (2025). *Peranan Politik Perempuan dalam Pembangunan : Studi tentang Keterwakilan Perempuan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik*. 6375–6382.
- Hafizah, N. (2022). *VISA : Journal of Visions and Ideas Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah VISA : Journal of Visions and Ideas*. 3(1), 13–21.
- Jung, H. (2021). *The Effect of Mayoral Gender on Gendered Budget : Evidence from South Korea*. <https://doi.org/10.1177/14789299211021517>
- Jung, S., & Jung, S. (2022). Public Performance & Management Review Determinants of Gender Budgeting Practices : Evidence from Municipal Governments in South Korea Determinants of Gender Budgeting Practices : Evidence from Municipal Governments in South Korea. *Public Performance & Management Review*, 45(4), 940–969. <https://doi.org/10.1080/15309576.2022.2051113>
- Keelson, S. A., Armstrong-baidoo, M., Asorh, P. O., Amoah, J., & Jibril, A. B. (2025). *The role of women in executive positions and their voice in policymaking in a developing nation*.
- Moser, B., & Korac, S. (2021). Introducing Gender Perspectives in the Budgetary Process at the Central Government Level. *International Journal of Public Administration*, 44(14), 1274–1285. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1755683>
- Mueller, S., & Saliterer, I. (2024). *Assessing the role of gender-related aspects in public budgeting debates : A view of the central level in Germany*. <https://doi.org/10.1177/00208523231156538>
- Okereka, T. N., Sokoh, O. P., & Chris, G. (2023). *Application of Agency Theory in Administrative Accountability and Public Service Delivery in Local Government Councils in Delta State*. 3(2), 3–6.
- Prastio, L. O., & Nurlia, E. (2021). *Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah : Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan*. 03, 6–8.
- Pugu, M. R. (2025). *The Role of Political Budgeting in Strengthening an Inclusive Government System : A Literature Analysis*. 4(1), 55–62.
- Rilly, L., Sondakh, E., Engka, D. S. M., & Walewangko, E. N. (2025). *Analysis gender-responsive budget implementation (Study of the 2019-2023 regional budget of North Sulawesi Province)*. 4(2), 47–56. <https://doi.org/10.58784/cfabr.258>
- Sobeukum, A. Y. (2024). *Partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD kabupaten kupang provinsi nusa tenggara timur 1*. 4(2), 76–91.